

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kabupaten merupakan bagian dari wilayah administrasi di Indonesia dibawah naungan provinsi, yang dipimpin oleh seorang Bupati. Kabupaten merupakan pembagian wilayah administrasi setelah provinsi adalah kota. Kota merupakan wilayah administrasi selain Kabupaten. Secara umum, baik kabupaten maupun kota memiliki wewenang yang sama. UUD 1945 Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah Provinsi daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Kabupaten wilayahnya dominan pedesaan. Wilayah kabupaten dianggap lebih luas dibandingkan kota. Kabupaten biasanya terdiri dari lima kecamatan sedangkan kota minimal empat kecamatan. Sektor perekonomian kabupaten berasal dari pertanian.

Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan tentang pertanggungjawaban APBN setiap Tahun berserta perubahannya. Anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) suatu rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang terperinci dan sistematis yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Keuangan Negara.

Pemerintahan daerah Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan pemerintahannya sudah sesuai dengan UUD 1945 yaitu mampu mengatur dan mengurus pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah Kabupaten Malang memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan mengalokasikan dana secara mandiri berdasarkan skala prioritas pembangunan. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut UU No. 32 Tahun 2005 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dua aspek kinerja keuangan yang dituntut dari otonomi daerah. Aspek pertama yaitu daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua berkaitan dengan manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan serta efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai Reformasi pembiayaan atau *Financing Reform*. pembangunan suatu negara memerlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagaaian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari APBD yang disusun setiap tahunnya oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik. Kinerja keuangannya pemerintah daerah kabupaten yang baik menunjukkan kemampuannya untuk mengelolah keuangan dalam rangka membiyai pelaksanaan otonomi daerah.

Kinerja keuangan juga dapat diukur dengan menganalisis rasio keuangan pemerintah daerah. Rasio keuangan pemerintah daerah dihitung dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan. Rasio Kemandirian keuangan Daerah

menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, maupun pembangunan dan pelayanan dalam masyarakat yang telah dinyatakan bahwa telah membayar pajak dan retribusi dimana sebagai sumber yang sangat diperlukan oleh daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pihak ekstern dinilai semakin rendah. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kekuatan daerah dalam mengaktualisasikan pendapatan daerah yang digunakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah agar seberapa besar tingkat kemampuan daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja daerah semakin baik. Rasio efisiensi yang menggambarkan perbandingan antara besarnya suatu biaya yang sudah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dari rasio efisiensi memiliki kriteria sendiri, kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio kurang dari 1% atau dibawah 100%. Semakin kecil sebuah rasio yang didapatkan berarti kemampuan daerah dinilai semakin baik. Rasio Aktivitas Jadi bisa dilihat jika semakin tinggi presentase dana yang sudah dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi yang digunakan untuk sarana prasarana ekonomi di masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar suatu kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang sudah dicapai dari periode ke periode. Dengan diketahuinya pertumbuhan masing-masing sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat dipergunakan untuk mengevaluasi potensi yang perlu mendapat perhatian. Jika semakin tinggi presentase pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran berarti semakin besarnya kemampuan pemerintah

daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan sebuah keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

Penelitian ini didukung oleh Tika Septiani (2018) Analisis kinerja keuangan dan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten dan Kota Cirebon. Bahwa berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, rata-rata kinerja pengelolaan keuangan di daerah kabupaten Cirebon dan tingkat kemandirian daerah kabupaten dan kota Cirebon berdasarkan analisis keuangan yaitu dinyatakan baik. Perhitungan yang digunakan yaitu menghitung rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio efektivitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Ferdinan Nur (2019) Analisis Pengelolaan keuangan Daerah terhadap kemandirian fiskal Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Kutai Kartanegara belum maksimal, dari sisi pendapatan dapat dilihat dari masih belum mandirinya daerah secara fiskal.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan daerah Kabupaten Malang sebagai objek penelitian, guna dapat menganalisis kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandiriannya dengan mengambil judul skripsi” **Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017-2021**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana menganalisis kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian pada kabaupen Malang Tahun anggaran 2017-2021?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pengelolaan dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Malang pada tahun 2017-2021.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **Penelitian ini berguna bagi:**

#### **a. Penulis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian. Serta menjadi bahan perbandingan antara teori yang di dapat saat perkuliahan.

#### **b. Pemerintahan Kabupaten Malang**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi Pemerintahan Kabupaten Malang dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian.

#### **c. Pihak lain**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan dapat menambah wawasan, serta ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil penelitian dibidang sektor publik.

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

